

Feminisasi Kemiskinan dan Pendidikan di Aceh Besar

Musdawati¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry - Indonesia

musda.wati@ar-raniry.ac.id

Abstract

The feminization of poverty in Aceh Besar is a complex phenomenon in which women experience the impacts of poverty that are much more severe than men, although it is often not detected in statistical data. This study aims to identify the causes and impacts of poverty among women, with a focus on gender constructions that always position women in a vulnerable state. Although official poverty figures are often calculated based on male groups, women's experiences show that they bear a greater burden, both in terms of domestic responsibilities and in access to resources. Using a qualitative approach, this study collected data from in-depth interviews and focus group discussions with women in Aceh Besar, to explore their experiences related to education and poverty. The results show that education plays a key role in women's empowerment, as well as a tool for reducing poverty. Therefore, an emphasis on women's education and gender-based policies are crucial as solutions in addressing the feminization of poverty. This study suggests the need for more accurate and inclusive data to understand the dimensions of poverty faced by women and to formulate policies that are responsive to their specific needs.

Keywords: Feminization of Poverty: Education: Gender: Aceh Besar.

Abstrak

Feminisasi kemiskinan di Aceh Besar adalah fenomena yang kompleks, di mana perempuan berdampak dari kemiskinan jauh lebih berat dibandingkan dengan laki-laki, meskipun sering tidak terlihat dalam data statistik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab dan dampak kemiskinan di kalangan perempuan. Meskipun angka kemiskinan resmi sering kali dihitung berdasarkan kelompok laki-laki, pengalaman perempuan menunjukkan bahwa mereka menanggung beban yang lebih berat, baik dalam hal tanggung jawab domestik maupun dalam akses terhadap sumber daya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dengan perempuan di Aceh Besar, untuk menggali pengalaman mereka terkait pendidikan dan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam

pemberdayaan perempuan, serta berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci: feminisasi kemiskinan, pendidikan, gender, Aceh Besar.

Introduction

Fenomena feminisasi kemiskinan adalah isu yang sangat penting dalam studi kemiskinan yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian di Indonesia, termasuk di Aceh Besar. Belakangan ini, angka kemiskinan di Aceh Besar menunjukkan tren yang mengkhawatirkan; pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan sebesar 15,6%, di mana lebih dari 50% dari kelompok tersebut adalah perempuan. Meskipun data resmi mengenai angka kemiskinan sering kali disajikan tanpa memisahkan berdasarkan gender, penelitian menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling terdampak oleh kemiskinan, dan pengalaman mereka sering kali tidak terwakili dalam statistik (Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2023).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di kalangan perempuan di Aceh Besar adalah meningkatnya tingkat perceraian. Dengan semakin banyaknya perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat perceraian, fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah keluarga yang dipimpin oleh perempuan, yang sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rentan.

Berdasarkan data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik Aceh, keluarga yang dipimpin oleh perempuan mengalami tingkat kemiskinan yang 30% lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang dipimpin oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya dan pendidikan berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi keluarga (Aceh Besar Dalam Angka, 2023)

Sayangnya, kebijakan pemerintah masih belum sepenuhnya menyadari

munculnya fenomena feminisasi kemiskinan ini di Aceh Besar. Kurangnya data yang terdistribusi berdasarkan gender mengenai kemiskinan menambah kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Banyak kajian mengenai kemiskinan yang cenderung netral gender, sehingga mengakibatkan hilangnya pemahaman tentang bagaimana dinamika gender mempengaruhi data dan kebijakan kemiskinan (Andina, Wahyudi, 2023)

Kesenjangan yang ada dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak studi mengenai kemiskinan, sedikit di antaranya yang secara khusus membahas feminisasi kemiskinan dan dampaknya terhadap perempuan, serta peran pendidikan dalam mengatasi masalah ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada, dengan membahas secara eksplisit feminisasi kemiskinan dan perlunya diintegrasikan ke dalam kebijakan publik. Pemetaan data yang lebih terperinci mengenai kemiskinan perempuan di Aceh Besar penting untuk membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat dalam memerangi kemiskinan berbasis gender.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi perempuan di Aceh Besar, serta menyoroti pentingnya pendidikan sebagai solusi untuk mengatasi feminisasi kemiskinan yang mereka hadapi.

Literature Review

Konsep feminisasi kemiskinan merujuk pada fenomena di mana perempuan menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Menurut UN Women, perempuan sering kali berada dalam posisi paling miskin dalam masyarakat, dengan sebagian besar kelompok miskin di dunia adalah perempuan dan

anak-anak (UN Women, 2021). Di Indonesia, tingkat kemiskinan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sementara kepala keluarga perempuan sering mengalami tingkat kemiskinan yang lebih parah. Data dari BPS menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan tingkat kemiskinan pada rumah tangga yang dikepalai perempuan, penurunan tersebut lebih lambat dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki (BPS, 2021). Feminisasi kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk struktur keluarga, pekerjaan, kekerasan seksual, pendidikan, perubahan iklim, dan kesehatan (Karlina, Munandar, 2021).

Stereotip tentang perempuan dalam budaya patriarki sering membatasi peluang perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rois Ahmad dan Edi Susilo menunjukkan bahwa kemiskinan perempuan merupakan hasil dari faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi, serta struktur yang membatasi akses perempuan terhadap bantuan dan sumber daya (Wibowo, 2012).

Teori Relasi Sosial yang diperkenalkan oleh Naila Kabeer menggarisbawahi pentingnya analisis relasi sosial dalam menilai kebijakan pembangunan. Kabeer berpendapat bahwa untuk menciptakan kebijakan yang adil dan sensitif gender, penting untuk mengevaluasi distribusi sumber daya, tanggung jawab, dan kekuasaan dalam masyarakat (Kabeer, 1994). Pendekatan ini menekankan pada hubungan struktural yang menentukan peran dan akses terhadap sumber daya serta kekuasaan dalam masyarakat. Dalam pandangan Naila Kabeer, konsep pemberdayaan diartikan sebagai kemampuan untuk memilih (*ability to choose*).

Pemberdayaan mencakup proses di mana individu memperoleh kapasitas untuk membuat keputusan strategis yang memengaruhi kehidupan mereka. Kabeer mengaitkan pemberdayaan dengan dimensi *agency*, sumber daya, dan pencapaian, serta menekankan bahwa pemberdayaan memerlukan perubahan yang

memungkinkan individu untuk mengakses pilihan hidup yang lebih baik (Kabeer, 1999). Haughton & Khandker (2012) menyatakan bahwa penyebab utama kemiskinan di kalangan perempuan meliputi karakteristik wilayah, masyarakat, rumah tangga, dan individu.⁶

Namun, Listyaningsih (2004) mencatat bahwa salah satu faktor penyebab seseorang jatuh ke dalam kemiskinan adalah ketidakberuntungan (disadvantages) yang melekat pada keluarga miskin. Selain itu, keterbatasan kepemilikan aset juga berkontribusi pada kemiskinan. Faktor lain yang penting adalah kelemahan fisik yang sering dialami oleh kelompok disabilitas. Keterasingan (isolation) juga merupakan faktor utama penyebab kemiskinan, yang ditimbulkan oleh banyak faktor, termasuk kerentanan dan ketidakberdayaan.

Jika kemiskinan dipahami sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, maka beberapa faktor yang telah disebutkan di atas menjadi penyebab mendasar seseorang jatuh ke dalam kondisi miskin. Hal ini juga menjadi penghalang bagi seseorang untuk memenuhi segala kebutuhannya, termasuk kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, serta pendidikan.

Konsep Feminisasi Kemiskinan.

Menurut UN Women, salah satu badan PBB yang menangani isu perempuan, menyatakan bahwa "women are the world's poor" yang berarti perempuan adalah kelompok miskin di antara kelompok termiskin. Di hampir semua negara berkembang dan maju, perempuan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. (Zahrawati, 2020)

Bahkan, PBB mencatat bahwa sekitar 1,5 miliar orang di dunia hidup dengan penghasilan di bawah 1 dolar per hari; ironisnya, mayoritas dari kelompok miskin

ini adalah perempuan dan anak-anak. Di Indonesia, kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang kompleks dan belum ada solusinya (PBB, 2021).

Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan yang menyatakan bahwa pada Maret 2021, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 10,14% atau sekitar 27,54 juta penduduk. Tingkat kemiskinan pada Maret 2021 ini sedikit turun dibandingkan September 2020, namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019 (BPS, 2021)

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan (persentase rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan) pada rumah tangga yang dipimpin oleh wanita lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh pria. Meski demikian, laju penurunan kemiskinan tahunan selama periode 2008-2012 untuk rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan (rata-rata 7,16 persen) sedikit lebih lambat dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki (rata-rata 7,77% per tahun).

Menurut Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, menjaga keberlangsungan hidup keluarga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Beberapa faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga antara lain perceraian, keadaan di mana perempuan hamil dan memiliki anak, ditinggal oleh laki-laki, serta kematian suami.

Selain itu, suami juga bisa tidak berperan sebagai pencari nafkah utama karena mengalami disabilitas, kehilangan pekerjaan, pergi dalam waktu lama tanpa memberi nafkah, atau juga karena belum menikah tetapi memiliki tanggungan

keluarga. Ada juga perempuan yang suaminya tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga karena poligami, pengangguran, atau sakit.

Jumlah perempuan sebagai kepala keluarga terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan kenaikan terutama terjadi di daerah konflik dan bencana. Mayoritas perempuan yang menjadi kepala rumah tangga sekitar 67,17% disebabkan oleh kematian suaminya. Sayangnya, sebagian dari perempuan ini hidup di bawah garis kemiskinan (Kompas.id, 2020).

Keluarga yang dipimpin oleh perempuan merupakan yang paling rentan terhadap masalah ekonomi, terutama di masa pandemi COVID-19. Mereka semakin terpuruk karena di masa pandemi hingga saat ini harus berjuang sendiri. Selain bertanggung jawab atas nafkah keluarga, perempuan kepala keluarga juga harus menjalankan kewajiban domestik di rumah, seperti pekerjaan rumah tangga, merawat dan mengasuh anak, serta mendampingi anak belajar.

Feminisasi kemiskinan adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang tren meningkatnya ketidaksetaraan dalam standar hidup antara laki-laki dan perempuan, disebabkan oleh melebaranya kesenjangan gender dalam kemiskinan. Fenomena ini umumnya berhubungan dengan keadaan di mana perempuan dan anak-anak berada dalam status sosial ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam masyarakat.

Penyebab Feminisasi Kemiskinan

Dari segi penyebab, feminisasi kemiskinan terjadi karena berbagai faktor multi dimensi. Namun secara umum, hal ini dipicu oleh struktur keluarga dan rumah tangga, pekerjaan, kekerasan seksual, pendidikan, perubahan iklim, dan kesehatan. Di sisi lain, stereotip tradisional tentang perempuan yang kuat dalam budaya

patriarkhi membatasi peluang serta keterlibatan perempuan dalam berbagai pengambilan keputusan di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rois Ahmad Sanggar Kanto dan Edi Susilo (2015) menunjukkan bahwa kemiskinan perempuan tidak disebabkan oleh satu kategori saja, melainkan merupakan masalah multi dimensi. Salah satunya adalah faktor sosial budaya, yang menunjukkan bahwa secara budaya dan sosial, kemiskinan perempuan berakar pada kondisi yang menempatkan perempuan sebagai kelas dua dan tersubordinasi dalam masyarakat.

Alasan lainnya adalah faktor ekonomi, di mana biasanya pencari nafkah utama dalam masyarakat adalah laki-laki. Peran gender menciptakan ketimpangan yang lebih besar, terutama ketika ruang domestik dan publik dipisahkan secara *clear cut*, yang membatasi kesempatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan produktif yang menghasilkan uang. Faktor lain adalah struktur, di mana perempuan sering kali kesulitan mengakses bantuan pemerintah. Hal ini terjadi karena perempuan jarang terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat gampong.

Dari segi sumber daya, perempuan sering kali tidak mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki. Keterbatasan akses ini membuat perempuan tidak memperoleh manfaat yang setara dari berbagai program pemberdayaan yang diadakan oleh pemerintah.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam secara terstruktur untuk menggali informasi tentang feminisasi kemiskinan di Aceh Besar. Wawancara dilakukan dengan melibatkan 10 orang ibu rumah tangga yang memiliki pendidikan rata-rata SMA dan melakukan pekerjaan sampingan di rumah. Teknik wawancara terstruktur dipilih untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data dan

memungkinkan peneliti untuk mendalami pengalaman serta tantangan yang dihadapi oleh para responden secara mendetail. Setiap wawancara berlangsung antara 45 hingga 60 menit dan dirancang untuk mengeksplorasi berbagai aspek kemiskinan yang dialami perempuan, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, serta strategi coping yang mereka terapkan.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian. Data yang dikumpulkan dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan FGD akan dianalisis dengan metode triangulasi untuk memeriksa kesamaan dan objektivitas informasi. Proses ini memastikan data yang diperoleh akurat dan mencerminkan realitas sosial yang kompleks dalam konteks penelitian.

Results and Discussion

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Aceh Besar, sebelum pemekaran pada akhir tahun 1970-an, adalah Kota Banda Aceh. Setelah pemisahan Kota Banda Aceh, Aceh Besar kemudian menjadi kotamadya yang terpisah, dan ibu kota kabupaten dipindahkan ke Ke Jantho di pegunungan Seulawah. Wilayah ini secara geografis sangat dekat dengan Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Namun, dalam praktiknya, daerah ini masih tertinggal di beberapa sektor dibandingkan dengan wilayah Aceh lainnya, terutama di bidang kesejahteraan masyarakat. Saat ini, pemerintah daerah Aceh Besar masih berupaya untuk mengatasi salah satu masalah sosial yang signifikan, yaitu kemiskinan. Saat ini, daerah ini adalah area dengan tingkat kemiskinan yang paling serius di Aceh, merujuk pada data statistik.

Salah satu alasan dari angka tersebut adalah luas wilayah yang mencakup 23 kecamatan dan jarak yang jauh antara kecamatan dengan ibu kota di Jantho, serta

perbedaan antara area perkotaan dan pedesaan yang mengakibatkan masalah utama di daerah ini, yaitu akses dan ketersediaan sumber daya. Beberapa alasan di balik penelitian tentang Aceh Besar adalah untuk melihat isu kemiskinan dan menghubungkannya dengan isu gender, dalam hal ini kemiskinan perempuan menjadi tema yang menarik. Tingkat Pendidikan Dan Isu Gender Di Aceh Besar Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang telah dapat diakses oleh mayoritas anak-anak di Aceh Besar. Terdapat tidak ada disparitas pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan.

Meskipun secara statistik pendidikan menunjukkan bahwa akses pendidikan telah merata bagi anak-anak usia sekolah, tingginya angka pendidikan di kalangan usia produktif tidak menjamin adanya korelasi yang sama dalam hal partisipasi politik. Kenyataannya, meskipun tingkat pendidikan tinggi, hal tersebut belum memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah politik.

Situasi ini dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menduduki posisi-posisi penting di level pemerintahan yang sangat minim. Saat ini, hanya ada satu perempuan yang menduduki posisi kepala dinas, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Tidak ada camat perempuan dan hanya satu perempuan yang menjadi anggota legislatif dari Partai Lokal Aceh.

Salah satu kendala di balik rendahnya partisipasi politik perempuan adalah kurangnya akses perempuan terhadap kepengurusan partai, minimnya jumlah kader perempuan, serta budaya patriarki yang mengedepankan laki-laki dibanding perempuan.

Pandangan bahwa politik bukanlah wilayah perempuan masih sangat mengakar dan kuat dalam masyarakat. Meskipun terdapat kampanye "perempuan pilih perempuan," ajakan ini tidak cukup mempengaruhi masyarakat untuk melihat

bahwa perempuan juga dapat menjadi calon pemimpin yang berkualitas.

Angka Tenaga Kerja dilihat dari aspek ketenagakerjaan, angka partisipasi laki-laki dan perempuan belum menunjukkan keseimbangan. Pembagian peran pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah domestik maupun publik, masih sangat membekas dalam masyarakat, khususnya di Aceh Besar.

Pasar kerja memberikan kesempatan kepada laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh pekerjaan. Namun, data tahun 2022 menunjukkan bahwa 55% (67,9%) dari kesempatan pekerjaan tersedia untuk laki-laki, sedangkan perempuan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang setara (Angelia, 2023)

Meskipun secara angka pendidikan perempuan melampaui laki-laki, namun dalam angka tenaga kerja, laki-laki masih mendominasi, sementara partisipasi perempuan berada pada tingkat yang rendah. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di ranah produktif. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, di antaranya adalah peran gender yang masih menganggap bahwa tugas domestik adalah tanggung jawab perempuan. Dalam sektor informal, perempuan lebih dominan.

Selain bekerja sebagai petani, perempuan juga bekerja sebagai penjual kue di warung kopi, membuka kios sendiri di samping rumah, atau berjualan di pasar dan kantin sekolah. Untuk wilayah pesisir seperti Lhoknga dan Leupung yang dikenal sebagai daerah wisata pantai, perempuan juga memiliki usaha kafe di pantai. Meskipun ada pula yang berjualan ikan asin dan mencari tirom. Pandemi terbukti memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, khususnya perempuan yang banyak bekerja di sektor informal.

Penyebab Kemiskinan Perempuan di Aceh Besar

Aceh Besar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah pemisahan, Aceh Besar menjadi kotamadya tersendiri dengan ibu kota kabupaten yang dipindahkan ke Jantho di pegunungan Seulawah.

Dari segi tata letak, wilayah ini sangat dekat dengan Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Namun, sebenarnya daerah ini masih tertinggal dalam beberapa sektor dibandingkan dengan wilayah Aceh lainnya, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, Pemda Aceh Besar masih berusaha mengatasi salah satu masalah sosial, yaitu kemiskinan. Saat ini, daerah ini adalah daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh, berdasarkan data statistik.

Salah satu alasan di balik angka kemiskinan tersebut adalah luas wilayah yang mencakup 23 kecamatan serta jarak yang jauh antara kecamatan dan Ibu Kota di Jantho, yang menyebabkan disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini mengakibatkan masalah utama di daerah ini, yaitu akses dan ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, isu kemiskinan dan kaitannya dengan gender, khususnya kemiskinan yang dialami perempuan, menjadi tema yang menarik untuk diteliti di Aceh Besar. Kemiskinan perempuan di Aceh Besar merupakan isu kompleks yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah ketidaksetaraan gender yang masih mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya. Masyarakat Aceh, yang didominasi oleh nilai-nilai tradisional dan agama, sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mengakibatkan perempuan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi.

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam menentukan kemampuan seorang individu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun, di Aceh Besar, tingkat

pendidikan perempuan masih relatif rendah. Banyak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena adanya stigma sosial yang menganggap bahwa pendidikan tinggi bukanlah prioritas bagi perempuan. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak mendapatkan akses yang layak untuk pendidikan dasar karena beberapa bias budaya dan ekonomi. Kurangnya pendidikan akan mempengaruhi kemampuan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan mandiri secara finansial.

Di samping itu, kurangnya akses terhadap pasar kerja juga menjadi faktor penting dalam kemiskinan perempuan. Banyak perempuan di Aceh Besar terjebak dalam pekerjaan informal atau pekerjaan yang tidak memberikan upah yang layak. Mereka sering kali bekerja di sektor pertanian atau sebagai buruh harian yang tidak memiliki perlindungan hukum dan jaminan sosial. Selain itu, banyak perempuan yang terpaksa mengambil pekerjaan di sektor informal yang menawarkan pendapatan rendah dan tidak stabil, sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi berbasis gender juga berkontribusi terhadap kemiskinan perempuan di Aceh Besar. Banyak perempuan yang terjebak dalam hubungan yang abusif, di mana mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan keuangan atau mencari pekerjaan. Ketidakmampuan untuk keluar dari situasi tersebut sering kali mengakibatkan ketergantungan ekonomi kepada pasangan mereka, yang memperburuk kondisi ekonomi mereka secara keseluruhan. Keberadaan stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai atau mencari perlindungan dari kekerasan juga memperburuk kondisi mereka, membuat mereka merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan.

Aspek kesehatan juga berperan dalam kemiskinan perempuan. Di Aceh Besar, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai masih menjadi masalah. Banyak

perempuan yang tidak mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, baik karena keterbatasan sumber daya maupun karena adanya hambatan budaya yang menganggap bahwa kesehatan perempuan kurang penting. Kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan perempuan untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga mengakibatkan siklus kemiskinan yang sulit untuk diatasi.

Selain itu, pengaruh bencana alam juga tidak dapat diabaikan. Aceh terkenal dengan risiko tinggi terhadap bencana alam, seperti tsunami dan gempa bumi. Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi darurat. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kepala keluarga setelah kehilangan suami mereka dalam bencana atau kehilangan sumber penghidupan. Meskipun mereka berjuang untuk bangkit kembali, banyak dari mereka tidak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka, sehingga menambah angka kemiskinan.

Akhirnya, kebijakan publik yang tidak berpihak pada pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Meskipun sudah ada berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, fokus pada pemberdayaan perempuan masih kurang. Tanpa adanya strategi dan kebijakan yang jelas untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, kemiskinan perempuan di Aceh Besar akan terus berlanjut.

Secara keseluruhan, kemiskinan perempuan di Aceh Besar merupakan isu yang multidimensional. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan, sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan

ekonomi dan sosial daerah.

Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan

Di Aceh Besar, pendidikan perempuan memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan rasa diri dan kepercayaan diri mereka. Dengan memperoleh pendidikan, perempuan dapat memahami potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Proses pembelajaran ini membantu mereka mengenali kekuatan diri dan mendorong keyakinan bahwa mereka bisa memberikan kontribusi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Ketika perempuan merasa percaya diri dan berdaya, mereka lebih cenderung untuk mengambil inisiatif dan mengejar aspirasi pribadi serta profesional, yang selanjutnya mendukung perubahan positif dalam lingkungan sekitar mereka.

Pendidikan juga berperan sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan keterampilan perempuan di Aceh Besar, memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, perempuan dapat bersaing di pasar kerja dan terlibat dalam berbagai bidang ekonomi. Ini tidak hanya memperbaiki ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, akses terhadap pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan dapat membantu perempuan untuk memulai usaha mereka sendiri, yang mendorong kemandirian finansial dan meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat.

Selain itu, pendidikan perempuan di Aceh Besar dapat meningkatkan kesadaran dan daya kritis mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, ibu, dan istri. Melalui pendidikan, perempuan belajar mengenai hak-hak mereka, pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta tanggung jawab mereka dalam keluarga dan masyarakat. Kesadaran ini mendorong perempuan untuk

lebih aktif dalam advokasi hak-hak gender dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial di komunitas mereka. Dengan meningkatkan daya kritis, perempuan dapat mempertanyakan norma-norma yang ada dan memperjuangkan perubahan yang lebih adil, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Conclusion

Kemiskinan adalah situasi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka berdasarkan standar kesejahteraan yang dibuat oleh suatu pemerintahan. Kemiskinan di Aceh Besar tidak terlepas dari budaya dan struktur masyarakat yang memiskin, dan cara pandang ini diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Seperti kekayaan, kemiskinan juga diwariskan.

Peran gender yang dibakukan dan stereotyping yang menempatkan perempuan diranah domestik sangat berkontribusi terhadap pembatasan perempuan untuk mengakses pekerjaan diranah publik, disamping tidak terlihatnya perempuan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kebijakan pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan memiliki peran krusial dalam mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dalam akses pendidikan, kita tidak hanya memenuhi hak dasar mereka, tetapi juga memaksimalkan potensi ekonomi dan sosial suatu negara.

Pendidikan yang berkualitas memberikan perempuan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia kerja. Kebijakan yang mendukung beasiswa bagi perempuan, terutama di daerah terpencil atau yang memiliki batasan budaya, dapat membantu mengatasi hambatan ekonomi yang sering kali menjadi penghalang akses pendidikan. Selain itu, kurikulum yang sensitif terhadap gender dan pelatihan bagi pendidik untuk memahami isu-isu

gender juga penting agar perempuan merasa nyaman dan diterima di lingkungan belajar.

Melalui pendidikan, perempuan dapat diberdayakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan, ekonomi, dan hak-hak mereka. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, misalnya, memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan mengelola kesehatan diri dan keluarga. Selain itu, perempuan yang terdidik cenderung lebih aktif dalam kemajuan komunitas mereka dan mampu memberikan dampak positif pada generasi berikutnya.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu berkomitmen untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperhatikan kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk memberdayakan perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

References

- Nuridin, N. (2019). Disaster Risk Reduction in Education and the Secondary High School Science Curriculum in Indonesia. In Discovery.Ucl.Ac.Uk. University College London
- Ahmad, N. R., & Susilo, E. (2015). Fenomena Kemiskinan Dari Perspektif Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin. *Jurnal Wacana*.
- Fawziah Zahrawati B (2020) Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan AL MA' ARIEF: JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA Vol 2 No 1 2020 9
- Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. (2023). Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh, Maret 2023.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. (2023). *Data Kemiskinan Aceh Besar*. Retrieved from BPS Aceh

- Bank Dunia. (2023). *Global Gender Gap Report*. Retrieved from World Bank
- Boserup, E. (1970). *Women's Role in Economic Development*. St. Martin's Press.
- BPS (2021). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021*
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2021). *Laporan Kemiskinan Indonesia*.
- Chen, M. (2017). *Feminization of Poverty*. *Gender and Development Journal*.
- Elson, D. (1995). *Gender Awareness in Modeling Structural Adjustment*. In *Gender and Development*, 3(2), 9-19.
- Elson, D. (1999). *Gender and the Economics of Poverty*. *Gender and Development Journal*
- Fraser, N. (2003). *Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation*. *Feminist Theory*.
- <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2023/11/27/446032e07fba62158716eddc/profil-kemiskinan-kabupaten-aceh-besar-maret-2023.html>
- https://paskerid.kemnaker.go.id/storage/669bc85f-c5be-477b-8f7c-a8c9eae63be_1_Seputar%20Pasar%20Kerja%202022_Aceh.pdf
- Kabeer, N. (1994). *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*. Verso.
- Kabeer, N. (1999). *The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*. UNRISD.
- Kompas.id (2020). *Perempuan Kepala Keluarga Kian Terpuruk*. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/08/03/perempuan-kepala-keluarga-kian-terpuruk>
- Listyaningsih, U. 2004, *Dinamika Kemiskinan Di Yogyakarta*, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Meyer, B. D., & Sullivan, J. X. (2012). *Winning the War on Poverty: A Progress Report on the Self-Sufficiency Programs*. Brookings Institution.
- PBB (2021). *Laporan Tahunan PBB tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. PBB.

- Santi, S. (2007). Perempuan dan Kemiskinan: Pembangunan, Kebijakan, dan Feminisasi Kemiskinan. *Jurnal Forum Ilmiah Indonesia*, Vol. 4.
- Scott, J. W. (1986). *Gender and the Politics of History*. Columbia University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.
- UN Women. (2021). *Progress of the World's Women 2021-2022: Gender Equality in the Changing World of Work*.
- Wida Andina dan Amin Wahyudi. Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami. *Jurnal Wacana*– Vol. 18, No. 4 (2015)
ISSN : 1411-0199 E-ISSN : 2338-1884
- Nur Rois Ahmad, Sanggar Kanto, Edi Susilo. (20215) *Fenomena Kemiskinan Dari Perspektif Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (Studi Fenomenologi Tentang Makna dan Penyebab, Serta Strategi Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)*